



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 09 September 2023

Halaman: 8

Pedagang TM 2 Geruduk DPRD Kota Jogja

Pertanyakan Validasi Data Rencana Relokasi Jilid 2

JOGJA - Para pedagang Teras Malioboro (TM) 2 menggeruduk kantor DPRD Kota Jogja, kemarin (8/9). Mereka meminta kejelasan soal validasi data terkait rencana relokasi jilid 2. Pedagang datang tiba sekitar pukul 13.00 dengan membawa poster berisi keluhan kesah dan harapan. Ketua DPRD Danang Rudyatmoko menerima mereka.

Saat audiensi itu, pengurus Paguyuban Pedagang Tri Dharma Supriyati menjelaskan, ada indikasi penggelempungan data dan validasi data pedagang yang terkesan tidak transparan. Dulu saat relokasi jilid 1 dilakukan, UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja mendata pedagang lewat paguyuban. Namun, saat relokasi jilid 2 ini pendataan justru dilakukan *person by person*.

"Dari awal relokasi jilid 1, paguyuban dilibatkan. Terus kalau person per person datang secara pribadi ke UPT secara langsung, bagaimana tahu itu pedagang atau bukan," katanya.



DINILAI TAK TRANSPARAN: Audiensi pedagang Teras Malioboro 2 di DPRD Kota Jogja, kemarin (8/9). Mereka meminta kejelasan soal validasi data terkait rencana relokasi jilid 2.

Dikatakan, ia mendapatkan selebaran dari UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja di dalamnya turut terlampir nama-nama pedagang TM 2 yang akan direlokasi. Hasilnya, ada 100-an pedagang dari Paguyuban Tri Dharma yang tidak tercatat. Di sisi lain, juga ditemui adanya nama-nama baru. Bahkan sebelumnya nama baru itu tak pernah berjualan di selasar Malioboro, lokasi pedagang kaki lima sebelum direlokasi.

"Itu *kan* (data) harus di-cross check.

UPT tidak memberikan ruang kepada kami siapa saja yang masuk. Untuk data-data tidak bisa akses. Total pedagang di TM 2 ada 1.041, sementara pedagang dari Paguyuban Tri Dharma ada 923," katanya.

Supriyati bersama pedagang TM 2 meminta UPT untuk menghentikan proses validasi yang dinilai tidak transparan. Pihak UPT juga diminta melakukan validasi data faktual atau sesuai dengan kenyataan. Caranya dengan mendata pedagang di lapak masing-masing

atau satu demi satu.

"Ada solusi yang baik yaitu pendataan lapak. Samping kanan kiri itu bisa diketahui benar-benar pedagang yang dulunya di selasar atau bukan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Suryani mengaku akan menindaklanjuti keluhan para pedagang TM 2 ini. Rencananya Selasa (12/9) akan turut memanggil jajaran Dinas Kebudayaan Kota Jogja untuk berupaya menemukan titik terang.

"Tindak lanjutnya *kan* sesuai rekomendasi ketua dewan dilimpahkan ke Komisi D untuk OPD-nya, Dinas Kebudayaan. *Kan* ada di Disbud wewenangnyanya. Kami berencana mengundang Dinas Kebudayaan menindaklanjuti rekomendasi ketua dewan," katanya.

Dia menambahkan, usulan pedagang untuk menunda sementara proses validasi data pedagang TM 2 sebaiknya dilakukan oleh UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. "Menata lagi, seperti apa nanti ke depannya *kan* harus sesuai rekomendasi ketua dewan," ungkapnya. (isa/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005